



**EVALUASI RENSTRA
TAHUN 2018-2023
KECAMATAN PEKUNCEN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN**

Jl. Raya Ajibarang-tegal KM 04 Banjaranyar No.9

Kode Pos 53164 Telp/Fax (0281) 6439329

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan evaluasi renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023.

Laporan evaluasi renstra Kecamatan Pekuncen disusun untuk mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2019 dan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur yang ada yaitu dari nomenklatur lama (permendagri 13) ke nomenklatur baru (Permendagri 30).

Laporan evaluasi renstra yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas pelaksanaan proram, kegiatan dan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan evaluasi renstra 2018-2023 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekuncen, Juni 2020

CAMAT PEKUNCEN



PARSONO, S.Sos., MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670701 199209 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang lingkup
- E. Output Kegiatan
- F. Sistematika Laporan

BAB II TUJUAN

- A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019
- B. Evaluasi Program kegiatan
- C. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana program/Kegiatan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2019 Terhadap Target Akhir 2023
- B. Mapping Nomenklatur lama (Permen 13) ke Nomenklatur Baru (Permen 90)
- C. Penambahan Program kegiatan dan Perubahan Target Indikator

BAB IV HASIL

- A. Mapping Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90
- B. Rumusan Rencana program dan Kegiatan sesuai Permendagri 13
- C. Rumusan Rencana program dan kegiatan sesuai Permendagri 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi hasil RPJMD dilaksanakan setiap satu kali dalam 5 (lima) tahun oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja dan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan pembangunan baik dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hasil evaluasi RPJMD tersebut kemudian dapat menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Selain itu, evaluasi RPJMD diharapkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Pekuncen termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga wajib untuk melaksanakan evaluasi renstra Tahun 2018 – 2023 untuk mengetahui capaian kinerja bidang urusan tahun 2019 terhadap target akhir 2023.

Selain itu untuk Tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur dari nomenklatur lama (Permendagri Nomor 13) ke nomenklatur baru (Permendagri Nomor 90) sehingga perlu penambahan atau perubahan program dan indikator kegiatan. Dengan adanya evaluasi renstra menyesuaikan regulasi yang berubah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
 7. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
-

13. Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan evaluasi renstra Kecamatan Pekuncen adalah mengetahui pencapaian hasil program dan kegiatan maupun anggaran Renstra Tahun 2019 terhadap target akhir 2023, serta mengevaluasi konsistensi dan sinergitas kebijakan dan program Kecamatan Pekuncen yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 dan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi perubahan Renstra.

Adapun tujuan dari pekerjaan evaluasi Renstra Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan kondisi pekuncen khususnya pada bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
2. Mengukur capaian kinerja bidang urusan saat ini dan melihat sejauhmana tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 ini meliputi:

1. Melakukan analisis perubahan kebijakan yang perlu disinergikan dalam perencanaan Kecamatan Pekuncen.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen 2018-2023.
-

3. Melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen 2018-2023 sesuai dengan target tahun 2019 dan target akhir RPJMD tahun 2023.
4. Menggali permasalahan yang ada berkaitan dengan pencapaian hasil-hasil renstra sampai dengan tahun 2023.
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pekuncen periode berikutnya.

1.5 Output Kegiatan

Output pekerjaan penyusunan Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen 2018-2023 adalah Laporan Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023.

1.6 Sistematika Laporan Akhir

Sistematika Laporan Evaluasi Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang lingkup
- E. Output kegiatan
- F. Sistematika laporan

BAB II TUJUAN

- A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019
- B. Evaluasi Program kegiatan
- C. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana program/Kegiatan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2019 Terhadap Target Akhir 2023
- B. Mapping Nomenklatur lama (Permen 13) ke Nomenklatur Baru (Permen 90)
- C. Penambahan Program kegiatan dan Perubahan Target Indikator

BAB IV HASIL

- A. Mapping Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90
 - B. Rumusan rencana program dan kegiatan sesuai Permendagri 13
 - C. Rumusan rencana program dan kegiatan sesuai Permendagri 90
-

BAB II

TUJUAN

A. Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk Tahun 2019 evaluasi capaian kinerja Kecamatan Pekuncen Tahun 2019 dengan Indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 82 mendapat capaian 88, 27 atau dibulatkan 88 . Dengan demikian dari capaian yang didapat berarti prosentase kinerja kecamatan Pekuncen 102, 33 % atau melampau 100 %. Untuk Target akhir tahun 2023 yaitu 86 maka berdasarkan pencapaian Tahun 2019 kecamatan Pekuncen optimis bisa melampau target akhir Tahun 2023 yaitu 86.

Adapun matrik capaian kinerja Kecamatan Pekuncen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini (sumber data : e monev laporan triwulan 4 form 2)

B. Evaluasi Program Kegiatan

Evaluasi Program kegiatan Kecamatan Pekuncen Tahun 2019 yang terdiri dari 2 Program dan 15 kegiatan terdiri dari :

1. Program peningkatan pelayanan perkantoran dengan 9 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 2. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan Perangkat Daerah
 4. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah
 6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah
 7. Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor dan Rumah Dinas perangkat Daerah
 8. Pemeliharaan rutindinas/operasional kendaraan perangkat daerah.
 9. Pengendalian dan penatausahaan Keuangan daerah Perangkat Daerah.

2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan 6 kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2. Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan Desa/kelurahan
3. Fasilitasi Intensifikasi PBB
4. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan Tim Penanggulangan kemiskinan kecamatan
5. Peningkatan kualitas Penanganan ketentraman dan ketertiban Kecamatan
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes Kecamatan Pekuncen

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dari 2 program dan 15 kegiatan tersebut hampir semua program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 (sumber data : emonev laporan form 1)

C. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana program/Kegiatan

Adapun capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan yaitu:

Target keuangan	: Rp.1.199.600.000,-
Realisasi keuangan	: Rp.1.042.559.340,-
Target Fisik	: 99,98 %
Realisasi Fisik	: 97,87 %

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.3 (sumber data : emonev laporan form 3)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJM S.D. TAHUN 2019
KECAMATAN PEKUNCEN
Tahun 2019 Triwulan IV
Tabel 2 1

No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2018	Kinerja RKPD Tahun 2019				Prosentase Kinerja RKPD s.d. 2019	Status Capaian 2019	Kondisi Kinerja Akhir		Prosentase Kinerja RPJM s.d. 2019 Triwulan IV	Status Capaian 2019 Triwulan IV	
					Target 2019 (Sesuai RPJM)	Capaian 1	Capaian 2	Capaian 3			Capaian 4	Capaian 2019 s.d. Triwulan IV			Target Kondisi Kinerja Akhir RPJM
1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		NA	82	82	82	82	82	88	107.32	88	88	102.03	
Total 1 Indikator															

TABEL 2.3

No. Urusan	Urusan	No. Prog	Nama Program	Jum. Keg.	Pagu	Realisasi Tahun 2019					
						Tritvulan 1					
						Target Keuangan (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	
1	Administrasi Pemerintahan										
		1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	31.500.000	0					0
		2	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	848.524.000	39.63	336.282.623	175.254.355	52.12		38.64
		3	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5	319.576.000	18.21	58.198.998	11.430.000	19.64		18.21
	Total Urusan				1.199.600.000	19.28	394.481.621	186.684.355	47.32		18.96
	Total Urusan				1.199.600.000	19.28	394.481.621	186.684.355	47.32		13.96

**Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan F
KECAMATAN PEKUNCEN
Tahun 2019 Triwulan 4
Tabel 2.3**

Realisasi Tahun 2019												Re
Triwulan 2												
Realisasi Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	Target Keuangan (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	Target Keuangan (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	
0		0				0	0	0	0			
8.19	21.2	16.57	140,609,123	178,938,438	127.26	15.62	26.03	166.65	16.32	138,508,623	109,820,567	
1.11	6.09	23.84	76,194,998	21,408,250	28.1	21.48	6.88	52.03	24.39	77,959,998	36,238,900	
3.1	16.35	13.47	216,804,121	200,346,688	92.41	12.37	10.97	88.68	13.57	216,468,621	146,059,467	
3.1	16.35	13.47	216,804,121	200,346,688	92.41	12.37	10.97	88.68	13.57	216,468,621	146,059,467	

Realisasi Tahun 2019											
Triwulan 3						Triwulan 4					
Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	Target Keuangan (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	Target Keuangan (%)
	0	0		99.99	31,500,000	31,500,000	100	99.99	100	100.01	99.99
79.29	14.39	14.48	100.63	27.48	233,123,631	333,831,330	143.2	31.32	51.3	163.75	100
46.48	17.19	13.33	77.55	33.54	107,222,006	144,137,500	134.43	43.07	74.41	172.77	99.98
67.47	10.53	9.27	88.03	53.67	371,845,637	509,468,830	137.01	58.13	75.24	129.43	99.59
67.47	10.53	9.27	88.03	53.67	371,845,637	509,468,830	137.01	58.13	75.24	129.43	99.99

Realisasi Tahun 2019						
s. d. Triwulan 4						
Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	
31.500.000	31.500.000	100	99.99	100	100.01	
848.524.000	797.844.690	143.2	99.97	100	100.03	
319.576.000	213.214.650	134.43	99.98	95.73	95.75	
1.199.600.000	1.042.559.340	137.01	99.98	97.87	97.89	
1.199.600.000	1.042.559.340	137.01	99.98	97.87	97.89	

BAB III

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2019 Terhadap Target akhir 2023

Evaluasi Capaian Kinerja bidang urusan Kecamatan Pekuncen Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2023
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	IKM	82	88,27	107.6	86
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100
		2. Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	95	100	95

3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik.	%	100	100	100	100
		2. Persentase Linmas terbina	%	90	100	111	90
		3. Persentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.	%	100	100	100	100
		4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan.	%	100	98,32	98,32	100
		5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif.	%	95	95	100	95

		6.Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes.	%	100	100	100	100
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja bidang urusan Kecamatan Pekuncen Tahun 2019 terhadap target akhir akhir Tahun 2023, hampir semua tercapai bahkan ada yang melampaui target. Yang belum mencapai target hanya realisasi persentase pembayaran PBB yaitu terealisasi 98, 32 % dari target 100 %. Diharapkan untuk Tahun 2023 bisa tercapai 100 %. Sedangkan yang melebihi target antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target 82 % realisasi 88, 27 %. Dilihat target 2023 yaitu 86 %, sangat optimis target akhir bisa tercapai 100 % bahkan lebih.

B. Mapping Nomenklatur lama (Permendagri No 13 Tahun 2006) ke Nomenklatur baru (Permendagri No.90 Tahun 2019)

Dengan adanya perubahan Nomenklatur lama (Permendagri No 13 Tahun 2006) ke Nomenklatur baru (Permendagri No.90 Tahun 2019) maka perlu dilakukan mapping Urusan/bidangurusan/Program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Pekuncen Tahun 2021 – 2023 agar sesuai dengan regulasi yang baru.

Selain itu perubahan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tupoksi Kecamatan dari Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan yang baru yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Sistem Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan

di Kabupaten Banyumas juga menjadi alasan penting perlunya mapping program dan kegiatan Kecamatan Pekuncen.

Sedangkan dengan adanya Bencana Non Alam Covid 19 Tahun 2020 pengaruhnya ke Kecamatan Pekuncen yaitu adanya pergeseran dana Perjalanan Dinas Luar Daerah ditarik ke Anggaran Kabupaten Banyumas untuk membiayai penanganan covid 19. Adapun jumlah dana yang digeser sebesar Rp.48.598.456 (Empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

C. Perubahan Program kegiatan dan perubahan Target Indikator

Dengan adanya perubahan Nomenklatur lama (Permendagri No 13 Tahun 2006) ke Nomenklatur baru (Permendagri No.90 Tahun 2019) Kecamatan Pekuncen perlu melaksanakan penambahan program kegiatan baru dan perubahan target indikator yaitu antara lain :

Tabel .3.2.Program Kegiatan Baru

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya

4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik yang tersedia
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor yang tersedia
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai, dan jamuan tamu yang tersedia

PERMENDAGRI 90/2019

SAAT INI

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Pengampu	Kode			Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
	Penunjang Urusan Pemerintahan			7			Unsur Kewilayahan		
1	Administrasi Pemerintahan			7	01		Kecamatan		
1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1. Persentase realisasi keuangan program 2. Persentase realisasi fisik program		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				7	01	01	Administrasi Umum		
1	1 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	1. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar 2. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar 3. Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	7	01	01	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran Pajak, PRB dan Pajak kendaraan yang dibayar 2. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar 3. Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1	2 Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia 2. Cetak dan penggandaan yang tersedia 3. Alat Tulis Kantor yang tersedia 4. Alat listrik dan elektronik yang tersedia 5. Bahan perlengkapan kerja tersedia 6. Perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Kasubbag Umum dan	7	01	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				7	01	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Cetak dan penggandaan yang tersedia	
				7	01	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Alat listrik dan elektronik yang tersedia	
				7	01	01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Bahan perlengkapan kerja tersedia	
				7	01	01	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5. Bahan perlengkapan kerja tersedia	
				7	01	01	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Perangko, materai BBM Operasional	
				7	01	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	

1	1	4	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Tenaga Kebersihan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
1	1	10	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi yang dibayarkan honorinya Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
1	1	5	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat. Koordinasi dan konsultasi	kasubbag Umum dan Kepegawaian	7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1	1	6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia		7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	
		7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik		7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	
4	1	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik		7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	
		9	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik		7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Kesesuaian program antar		7	01	01		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintah dalam kondisi baik	
		1	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan 2. Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	7	01	01	2.01	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
						7	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

1	43	2	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	1. Kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa/Dana Kelurahan yang terfasilitasi 2. Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi 3. Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan 4. Pemohon PATEN yang terlayani 5. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa/kelurahan 6. Kegiatan perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan yang terfasilitasi	Kasi Pemerintahan Desa	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan	Kasi Pemerintahan Desa dan Kasi Ekonomi Pembangunan
1	43	4	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulan Kemiskinan Kecamatan	1. Pemohon PATEN yang terlayani 2. Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 3. Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	Kasi Permas	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.	Kasi Permas
						7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan.	
						7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
						7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteertiban dan Ketertiban Umum		
4	43	5	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1. Pelaksanaan rakor Linmas 2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani 3. Pembinaan kepada linmas	Kasi Trantib	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1. Terlaksananya rakor Linmas 2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani 3. terlaksananya rapat-rapat Pembinaan kepada linmas	Kasi Trantib
						7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
						7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
						7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kasi Pemerintahan Desa

1	43	90	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	1. Frekuensi money terkait binwas APBDes 2. Frekuensi rakor binwas APBDes	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	1. Frekuensi money terkait binwas APBDes 2. Frekuensi rakor binwas APBDes
---	----	----	--	--	---	----	----	------	----	--	--

Pekuncen, 2 Januari 2020

CAMAT PEKUNCEN



PARSONC, S. Sos., Msi

NIP.1967071 199209 1 001

BAB IV

HASIL

A. Mapping program kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

Hasil evaluasi renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 dengan adanya nomenklatur baru dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 maka dilaksanakan mapping program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019.

Dengan adanya mapping program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 ada perubahan dan penambahan program dan kegiatan dari program sesuai permendagri 13 Tahun 2006.

Adapun rincian mapping dari nomenklatur lama (Permendagri 13 Tahun 2006) ke nomenklatur baru (permendagri 90 Tahun 2019) dapat dilihat pada tabel 4.1 (sumber data : eplaning renja laporan mapping)

B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 program 16 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Program peningkatan pelayanan perkantoran dengan 9 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 2. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan Perangkat Daerah
 4. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah
 6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah
 7. Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor dan Rumah Dinas perangkat Daerah
 8. Pemeliharaan rutindinas/operasional kendaraan perangkat daerah.

9. Pengendalian dan penatausahaan Keuangan daerah Perangkat Daerah.
 2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah dengan 1 kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan 6 kegiatan yaitu :
 1. Fasilitasi penyeienggaraan Pelayanan Kecamatan
 2. Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan Desa/kelurahan
 3. Fasilitasi Intensifikasi PBB
 4. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan Tim Penanggulangan kemiskinan kecamatan
 5. Peningkatan kualitas Penanganan ketentraman dan ketertiban Kecamatan
 6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes Kecamatan Pekuncen
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 (sumber data : eplanning renja laporan 86)

C. Rumusan Rencana program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

Rumusan Rencana program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri dari :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.3 (sumber data : eplanning renja laporan 90)

TABEL 4.1

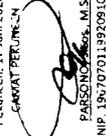
nama OPD : KECAMATAN PEKUNEN
 : Unsur Kewilayahan (7)
 : Kecamatan (7.01)

NOMINIKLATUR DOKUMEN PEREKAMAN YANG MASIH BERLAKU
Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Monitoring, dan Evaluasi

Kode	Program	Outcome	Satuan	Kode	Kegiatan	Output	Satuan	Kode Program	Program	Hasil Program/ Outcome	Satuan	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Materi Kegiatan/ Output	Satuan	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Output Sub Kegiatan	Satuan	PENGSUBLING				
																					Ind Subkegiatan	Ind Subkegiatan			
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	4.01.001.006	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Perengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit	10	10	11	13	
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.006	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit	10	10	11	13	
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	10	10	11	13	
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	10	10	11	13	
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	10	10	11	13	
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.009	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rumah dinas dalam kondisi baik	Unit	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	4.01.043.004	fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	%	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	%	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	4.01.043.004	fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	%	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Perengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	4.01.043.003	fasilitasi Intensifikasi PBB	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB	%	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Memenuhi Direct Subsidies	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang ditimpahkan.	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang ditimpahkan.	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB	%	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.002	fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APB/DES Kecamatan	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	%	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.06.2.01.03	fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Kej	10	10	11	13
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.003	fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APB/DES Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.06.2.01.03	fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Kej	10	10	11	13
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.002	fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APB/DES Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	%	7.01.06.2.01.03	fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB/DES	Kej	10	10	11	13
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.001	fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.001	fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	10	10	11	13	
4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	4.01.043.001	fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES/ADK	%	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non pertanian	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	10	10	11	13	

5	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	4.01.043.002	%	7.01.03	7.01.03.2.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	7.01.03.2.01	%	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Kali	Ind subbagelatan
6	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBD/DAK	4.01.043.002	%	7.01.06	7.01.06.2.01	Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBD/DAK	7.01.06.2.01	%	7.01.06.2.01.03	Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan yang terfasilitasi	Kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi	Kali	Ind subbagelatan
7	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	4.01.043.002	%	7.01.03	7.01.03.2.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	7.01.03.2.01	%	7.01.03.2.01.01	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	%	Ind subbagelatan
8	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	4.01.043.002	%	7.01.03	7.01.03.2.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	7.01.03.2.01	%	7.01.03.2.01.01	Pelembagaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	Pelembagaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	%	Ind subbagelatan
9	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	4.01.001.009	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Bulan	Ind subbagelatan
10	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	4.01.001.009	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Bulan	Ind subbagelatan
11	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	4.01.001.010	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi keuangan program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.07	Honor pengabdian keuang Daerah Peringkat Daerah yang dibayarkan	Honor pengabdian keuang Daerah Peringkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	Ind subbagelatan
12	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lintas Terbina	4.01.043.005	%	7.01.04	7.01.04.2.02	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Lintas Terbina	7.01.04.2.02	%	7.01.04.2.02.01	Shingitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Shingitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	%	Ind subbagelatan
13	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lintas Terbina	4.01.043.005	%	7.01.04	7.01.04.2.01	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Lintas Terbina	7.01.04.2.01	%	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	%	Ind subbagelatan
14	4.01.043	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lintas Terbina	4.01.043.005	%	7.01.04	7.01.04.2.01	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Lintas Terbina	7.01.04.2.01	%	7.01.04.2.01.01	Penyediaan bahan logistik kantor Peringkat Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor Peringkat Daerah	%	Ind subbagelatan
15	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	4.01.001.002	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.11	Penyediaan barang logistik cetak dan pengandaian yang tersedia	Penyediaan barang logistik cetak dan pengandaian yang tersedia	Kali	Ind subbagelatan
16	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	4.01.001.002	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.13	Perangkat, material dan benda pos lainnya yang tersedia	Perangkat, material dan benda pos lainnya yang tersedia	Bulan	Ind subbagelatan
17	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	4.01.001.002	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.10	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan	Ind subbagelatan
18	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	4.01.001.001	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi keuangan program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.02	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun	Ind subbagelatan
19	4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	4.01.001.001	%	7.01.01	7.01.01.2.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi keuangan program	7.01.01.2.03	%	7.01.01.2.03.07	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Tahun	Ind subbagelatan

4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi kegiatan program	%	4.01.001.004	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pemenuhan, kebersihan Perangkat Daerah	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi, keamanan, pemenuhan, kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria	Bulan	Ind subkegiatan	
5.01.001	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Kesuksesan program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	4.01.006.001	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali						Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Dokumen	Ind kegiatan	
4.01.006	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Kesuksesan program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	4.01.006.001	Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan TKP/Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan pertemuan dinas yang dilaksanakan	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat-rapat perencanaan, pemenuhan dan evaluasi yang dilaksanakan	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Caji dan Tugasan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.12	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen alat listrik dan elektronik yang tersedia	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia	Bulan	Ind subkegiatan
4.01.001	Program Peningkatan Pelayanan Perantoran	Persentase realisasi fisik program	%	4.01.001.005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Bulan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	7.01.01.2.05	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7.01.01.2.05.17	Penyediaan Muek dan Jamur Minuman	Makanan minum dan pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	Ind subkegiatan

Pekunden, 17 Juni 2020
CAHYA PERKUNEN

 PARSITONAS, M.Si
 NIP. 196707011992091001

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Sesuai Permendagri 13 Tahun 2006
KECAMATAN PEKUNCEN
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Banyumas
Tabel 4.2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Nasional (Kode)	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah (Kab/ Kota)	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Tahun 2022			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Catatan Penting	
									APBD Kab	APBD Prov	APBN				
01	Penunjang Urusan Pemerintahan							875000000	0	0	0	875000000	875000000	875000000	
01 001	Administrasi Pemerintahan							875000000	0	0	0	875000000	875000000	875000000	
01 001 001	Peningkatan Pelayanan Perbankan				1. Persentase realisasi keuangan program2. Persentase realisasi fisik program			1. 100 %2. 100 %	0	0	0	6821000000	6821000000	6821000000	
01 001 001 001	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan Lta kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : - kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta memban jun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	1. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar2. Jasa transaksi keuangan yang dibayar		Pekuncen	1. 1 Tahun2. 1 Tahun	0	0	0	714000000	714000000	714000000	
01 001 001 001 002	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Alat Tulis Kantor yang tersedia		Pekuncen	100 Bulan	0	0	0	1000000000	1000000000	1000000000	

01	001	004	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah	7.a.A Pematapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pematapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show), dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoranya	Pekuncen	12 Bulan	1,76400000	0	0	176400000	12 Bulan	1,76400000	0	0	176400000	12 Bulan	1,76400000
01	001	005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan penelaahan dinas Perangkat Daerah	7.a.A Pematapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pematapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawain dan Keuangan yang dilaksanakan	Pekuncen	12 Bulan	120000000	0	0	120000000	12 Bulan	120000000	0	0	120000000	12 Bulan	120000000

01	001	006	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	7.a.1. Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jumpat bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi: publik, transparansi partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Pekuncen	100%	850000000	0	0	850000000	100%	850000000	165000000	165000000	165000000
01	001	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	7.a.1. Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jumpat bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi: publik, transparansi partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembaruguan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Pekuncen	100%	165000000	0	0	165000000	100%	165000000	165000000	165000000	165000000

01	043	003	Fasilitasi Intensifikasi PBB	7.a.A Pementapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pementapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan: Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB				0	0	100000000	100%	100000000	100000000
4	01	043	004	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengunggulan Kemiskinan Kecamatan	7.a.A Pementapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pementapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan: Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanganan kemiskinan kecamatan			0	0	250000000	100%	250000000	250000000

01	043	001	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang terfasilitasi	Pekuncen	100%	906000000	0	0	906000000	100%	906000000	0	0	906000000	100%	906000000
01	043	002	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	Pekuncen	100%	200000000	0	0	200000000	100%	200000000	0	0	200000000	100%	200000000

01	043	005	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertarikan dan Keterlibatan Kecamatan	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas pada Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan kekuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dari serapan aspirasi publik).	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Persentase gangguan ketertarikan dan keterlibatan kecamatan yang tertangani	Pekuncen	100%	25000000	0	0	0	25000000	100%	25000000	15000000	875000000	875000000	875000000
01	043	082	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Pekuncen	7.c.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Pembangunan sarana prasarana tersentral dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.	4.d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi pelaksanaannya, melalui: Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system secara	2.a. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes	Kecamatan Pekuncen	32 Keg	15000000	0	C	0	15000000	12 Keg	15000000	0	0	0	875000000
TOTAL Anggaran:																				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019
KECAMATAN PEKUNCEN
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Banyuwani
Tabel 4.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah (Kab/ Kota)	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional (Kode)	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Tahun 2022		Catatan Penting	
									Kebutuhan Dana/ pengu indikator dan Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pengu indikator		
									APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total				
01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN PEKUNCEN								3204310074	0	0	0	3204310074			
01.0.00.0.00.15.01	KECAMATAN PEKUNCEN								3204310074	0	0	0	3204310074			
7 01	Urusur Kewilayahan								3204310074	0	0	0	3204310074			
7 01 01	Kecamatan								3204310074	0	0	0	3204310074			
7 01 01	Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan2. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan3. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah4. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah			1. %2. %3. %4. %6	3006597574	0	0	0	3006597574	1. 100 %2. 100 %3. 100 %4. 100 %		
7 01 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun2. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			1. Dokumen2. Dokumen	12000000	0	0	0	12000000	1. 1 Dokumen2. 4 Dokumen	17364375	

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7.a.A Pematapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pematapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Banyumas	Dokumen	6000000	0	0	6000000	1. Dokumen	85000000
---	----	----	------	----	---	---	---	---	-------------------------------------	----------	---------	---------	---	---	---------	------------	----------

01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perluasan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Penir. Jkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi) pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengayasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	2329310074	0	0	2329310074	0	665387500	12 Bulan	2597413140	970848770
01	01	2.03	01	Administrasi Umum				Tersedianya pelayar. in Administrasi Umum	Bulan	665387500	0	0	665387500	0	665387500	12 Bulan	970848770	

01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Banyumas	Tahun	51662500	0	0	51662500	I Tahun	75245625
----	----	------	----	--	--	---	---	--	----------	-------	----------	---	---	----------	---------	----------

7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7.1.A Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkurbanan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penederhanaan birokrasi dengan fokus utama Serious dalam pencapaian tujuan program pemungutan	1. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria.2. Jasa transaksi keuangan yang dibayar.3. Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Banyumas	1. Bulan2. Tahun3. Bulan	2076000000	0	0	2076000000	1. 12 Bulan2. 1 Tahun3. 12 Bulan	181978650
---	----	----	------	----	---------------------------------------	--	---	--	--	----------	--------------------------	------------	---	---	------------	----------------------------------	-----------

01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.a.A Pemanfaatan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perbaikan kebutuhan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembergunaan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamannya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia 2. Perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Banyumas	1. Bulan 2. Bulan	300000000	0	0	300000000	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	310000000
----	----	------	----	------------------------------	--	---	---	---	----------	-------------------	-----------	---	---	-----------	-------------------------	-----------

01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.a.A Pemanfaatan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendataan pelayanan, perkuat keberbuktan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Pemanfaatan tata kelola konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kamal-dirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan	4.C. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama pencapaian tujuan program pembangunan	cetak dan penggandaan yang tersedia	Banyumas	eksemplar	10147500	0	0	10147500	32.500 eksemplar	20604875	
----	----	------	----	---	---	--	--	-------------------------------------	----------	-----------	----------	---	---	----------	------------------	----------	--

01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan PMSC) perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi keuangan pembangunan intern	3.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Banyumas	Jenis	30000070	0	0	30000000	5 Jenis	30000000	30000000
----	----	------	----	--	--	--	--	---	----------	-------	----------	---	---	----------	---------	----------	----------

01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perbaikan, peningkatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama pencapaian tujuan program pembangunan	bahan perlengkapan kerja tersedia	Banyumas	12 Bulan	3000000	0	0	4000000
----	----	------	----	--	--	---	--	-----------------------------------	----------	----------	---------	---	---	---------

01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.a.A Pemertapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemertapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal: peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian in-ern	4.c. Penederhanaan birokrasi dengan prioritas utama serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Banyumas	Jenis	40000000	0	0	40000000	5 Jenis	50000000
----	----	------	----	-----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	----------	-------	----------	---	---	----------	---------	----------

01	01	2	03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.a.A Pementapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkustaan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C Pementapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: perencanaan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan rasional); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan peng-awasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	A. C. Penederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Banyumas	Jenis	27000000	0	0	27000000	0	27000000	5 Jenis	23000000
----	----	---	----	----	----------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	----------	-------	----------	---	---	----------	---	----------	---------	----------

01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkutan keterbutaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Banyumas	Bulan	270000000	0	0	270000000	12 Bulan	280000000
----	----	------	----	--------------------------------	--	--	--	---	----------	-------	-----------	---	---	-----------	----------	-----------

01	01	2	03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perbaikan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: penneimbangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pembangunan inter-	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Series dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk. Provinsi / Pusat yang dilaksanakan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Banyumas	1. Bulan2. Bulan	131154000	0	0	131154000	1. 12 Bulan2. 12 Bulan	300982500
----	----	---	----	----	--	---	---	---	--	----------	------------------	-----------	---	---	-----------	------------------------	-----------

01	01	2.03	22	Pengadaan Perangkat Cerdang Kantor	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, peningkatan mutu keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: penjembaran sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (pengustan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan per. jendralan intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Sertus dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Perfektifitas Kantor perangkat daerah yang tersedia	Banyumas	Unit	600000000	0	0	600000000	10 Unit	600000000	1000000000
----	----	------	----	------------------------------------	--	---	---	---	----------	------	-----------	---	---	-----------	---------	-----------	------------

01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, pe-kustan keterbukaran informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama pencapaian tujuan program pembangunan	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Banyumas	Unit	6044.1000	0	0	6044.1000	10 Unit	6044.1000	102533258
----	----	------	----	-----------------------------------	--	--	--	---	----------	------	-----------	---	---	-----------	---------	-----------	-----------

01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, peningkatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: - pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); - penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Banyumas	%	16382500	0	0	16382500	100%	38201625
----	----	------	----	--	---	---	--	--------------------------------------	----------	---	----------	---	---	----------	------	----------

01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan, pelayanan, ketertarikan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: penguatan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja/perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); pengujian kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penyelenggaraan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. kendaraan bermotor koda 4 dalam keadaan baik2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Banyumas	1. Bulan2. Bulan	16000000	0	0	16000000	1. 12 Bulan2. 12 Bulan	38201625
----	----	------	----	--	---	---	---	--	----------	------------------	----------	---	---	----------	------------------------	----------

01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Bertala Perfengkapan Gedung Kant'v	7.a.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemancirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Sertus dalam pencapaian tujuan program pembangunan	perfengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Banyumas	Unit	9000000	0	0	90000000	10 Unit	9500000
----	----	------	----	---	---	--	--	---	----------	------	---------	---	---	----------	---------	---------

01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.A.A Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya peningkatan pelayanan, keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Pemantapan tata kelola: konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: penguatan sistem manajemen berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan	4.C. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Banyuwangi	Unit	9000000	0	0	0	9000000	100 Unit	9600812
01	02			Program Penganggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							1. %2. %	0	0	101025000	1. 100 %2. 100 %	2621785.10	
01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1. Jenis2. %	0	0	101025000	1. 7 Jenis2. 100 %	2621785.10	

01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	7.a.A Pementapan tata kelola pemerintahan, fokus pada percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkutan keberbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi. pemohon PATEN yang terlayani	Banyumas	1. %2. %	900000000	0	0	900000000	1. 100 %2. 100 %	250602660
----	----	------	----	---	--	--	--	---	----------	----------	-----------	---	---	-----------	------------------	-----------

01 02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.a.A Pemanfaatan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, peningkatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.C. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan kondisitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Perentase fasilitasi intervensifikasi PBB	Banyumas	%	1.0250000	0	0	110250000	100%	11576250
01 03	2.01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				1. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik		1. %2. %	47050000	0	0	470500000	1. 95 %2. 100 %	74088000
01 03	2.01	03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1. Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan2. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi		1. %2. %	47050000	0	0	470500000	1. 100 %2. 100 %	74088000

01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa	7.a.f Pemanjapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, kekuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemanjapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembanguran daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utu meny pada peningkatan kemandirian fiskal; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penyuatan implementasi kebijakan pengendalian inte	4. c. penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan2. kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Banyumas	1. %2. Kail	200000000	0	0	200000000	1. 100 %2. 1 Kail	50935500
----	----	------	----	--	--	---	---	--	----------	-------------	-----------	---	---	-----------	-------------------	----------

7	01	04	2.01	02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	7.a.1 Pemantapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, peningkatan ketertarikan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan: kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serious dalam pencapaian tujuan program pembangunan	Persentase gangguan ketertarikan dan kecemasan yang tertangani	Banyumas	%	250000000	0	0	250000000	100%	520000000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	----------	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7.a.A Pematapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya Pendekatan pelayanan, perkustan keterbukaan informasi, transparansi dan parti. ipasi publik;	4.C. Pematapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel; melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas stakeholder pada peningkatan kemandirian fiskal; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.C. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	pelaksanaan rakor Linmas	Banyumas	Kali	8000000	0	0	0	8000000	4 Kali	12155370
01	06	2.01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							16537500	0	0	0	16537500	100%	17364375
7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							16537500	0	0	0	16537500	100%	17364375

01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	7.a.A Pementapan tata kelola pemerintahan, fokus pada Percepatan Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, pertemuan, keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;	4.c. Pementapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan ke-mandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern	4.c. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan	1. Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDDesa dari monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2. Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDDesa. 3. Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa. 4. kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang tersertifikasi	Banyumas	1. %2. Kali3. Keg4. Kali	16537500	0	0	16537500	1. 100 %2. 12 Kali3. 12 Keg4. 1 Kali	17364375
TOTAL PAGU																